

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah diberikan Otonomi. Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti; pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pengaturan pembagian keuangan antara pusat dan daerah dalam pemerintahan yang terdesentralisasi akan menimbulkan masalah bagi harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah, apabila tidak diatur secara jelas dan adil.

Untuk mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting karena sesuai dengan azas Desentralisasi daerah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom berhak

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan sangat menentukan sekali tingkat kemandirian suatu daerah, karena pada hakekatnya otonomi daerah itu adalah kemandirian.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Seperti halnya Kota Tanjungpinang, memiliki pos- pos pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Kota Tanjungpinang memiliki posisi strategis, disamping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan, menjadi aset berharga yang turut berperan terhadap pertumbuhan perdagangan regional dan nasional.¹

Kota Tanjungpinang merupakan ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, pariwisata serta pusat budaya melayu. Kota Tanjungpinang terdiri dari empat Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat dan kecamatan Tanjungpinang Timur, dengan letak Kota Tanjungpinang yang strategis dan disetiap Kecamatanya memiliki hotel memberikan dampak terhadap pendapatan Kota tanjungpinang sendiri, khususnya pada bidang perhotelan.

Bidang perhotelan memiliki instrumen – instrumen yang terkait dengan pendapatan perhotelan sendiri yaitu pajak hotel. Pajak hotel terdiri dari dari pendapatan kamar hotel yang terjual dan jasa hotel diluar dari aktivitas penginapan kamar hotel. Pendapatan pajak hotel dapat dilihat dari jumlah kamar yang terjual yaitu tingkat hunian kamar, selain itu adanya jumlah hotel dan jumlah obyek wisata.

¹ Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 – 2033, halaman 1-1

Dengan posisi Kota Tanjungpinang yang strategis pada jalur perdagangan maka adanya kemungkinan terhadap pergerakan orang untuk transit di Kota ini, dimana adanya alternatif – alternatif rute perjalanan menuju Kota ini.

Banyaknya jumlah obyek wisata juga mengindikasikan adanya dampak terhadap tingkat hunian kamar, yaitu pada tahun 2013 jumlah kamar hotel yang tersedia sebanyak 1398 kamar². Dilihat dari jalan sebagai bagian dari mobilitas pergerakan khususnya berkaitan dengan obyek wisata Kota Tanjungpinang memiliki panjang jalan 294,24 km³.

Pos pendapatan perhotelan di Kota Tanjungpinang dilihat dalam kurun waktu Sembilan tahun yaitu, pertumbuhan dan kontribusi pada tahun 2006 – 2009 cenderung mengalami kenaikan. Yaitu pada tahun 2007 pertumbuhan pajak hotel 20,4% hingga 2009 pertumbuhan pajak hotel mencapai 32,1%. Sedangkan pada tahun 2010 – 2014 pertumbuhan dan kontribusi dari pajak hotel cenderung mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2013 yaitu dari 41,4% menjadi 7,2%. Sedangkan kontribusi pada Pajak Hotel disetiap tahunnya juga cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2013 kontribusi Pajak Hotel lebih rendah dibandingkan dengan delapan tahun terakhir, dengan kontribusi 3,89%. Pajak Hotel pada Tahun 2013 mencapai Rp. 4,287,948,935 dan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 110,219,360,397. Hal ini dikarenakan pendapatan dari pos – pos pajak dan retribusi pada Pendapatan Asli Daerah lainnya mengalami laju pertumbuhan dan peningkatan kontribusi.⁴

Dari uraian diatas maka dilakukan kajian mengenai peran pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik secara pendapatan pajak hotel dari kamar yang terjual maupun dari jasa perhotelannya guna dijadikan pertimbangan dalam kajian peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang adalah

² Data Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang

³ Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 – 2033

⁴ Penyusunan Identifikasi dan Optimalisasi PAD Kota Tanjungpinang, VI – 2

terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Dilihat dari pertumbuhan dan kontribusinya terdapat beberapa klasifikasi⁵ yang terdiri dari sektor prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Berdasarkan klasifikasi tersebut Pajak Hotel dari Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori berkembang, dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya. Permasalahan dari penelitian ini adalah sektor hotel yang belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari rata – rata pertumbuhan kontribusi dari pajak Hotel sendiri adalah 5,078% dan rata – rata pertumbuhan pajak hotel adalah 22,1%.⁶

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh kegiatan perhotelan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang ?
2. Bagaimana peran setiap Kecamatannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk melihat Pengaruh Kegiatan Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka disusun sasaran-sasaran penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap kegiatan perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Mengidentifikasi peran setiap Kecamatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang melalui Kegiatan Perhotelan.

⁵ Penyusunan Identifikasi dan Optimalisasi PAD Kota Tanjungpinang, halaman VII – 6

⁶ Penyusunan Identifikasi dan Optimalisasi PAD Kota Tanjungpinang, halaman VII – 4

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua ruang lingkup yaitu, ruang lingkup wilayah yang menjelaskan batasan wilayah yang menjadi objek studi, dan ruang lingkup materi yang membatasi materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pembagian ruang lingkup tersebut dilakukan untuk membuat pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara geografis, wilayah Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan dengan posisi berada pada $0^{\circ} 51'$ sampai dengan $0^{\circ} 59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ} 23'$ sampai $104^{\circ} 34'$. Secara administrasi, Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 kecamatan dan 18 kelurahan dengan luas wilayah kota adalah $239,5 \text{ Km}^2$ atau 23.950 Ha. Kecamatan Tanjungpinang Barat terdiri dari, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kemboja, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Bukit Cermin. Kecamatan Tanjungpinang Kota terdiri dari, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Desa Penyengat, Desa Kampung Bugis dan Desa Senggarang. Kecamatan Bukit Bestari terdiri dari, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjungayun Sakti, Kelurahan Dompok dan Kelurahan Sei jang. Kecamatan Tanjungpinang Timur terdiri dari , Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana dan Kelurahan Batu Sembilan.

Kota Tanjungpinang secara administratif dibatasi oleh :

Sebelah utara	:Teluk Bintan Kecamatan Teluk Bintan
Sebelah selatan	:Selat Karas, Desa Mantang Baru, Kecamatan Bintan Timur,
Sebelah timur	:Kecamatan Bintan Timur
Sebelah barat	:Selat Karas, Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan,

GAMBAR
PETA ADMINISTRASI

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi yang dibahas dalam penulisan ini adalah meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perhotelan di Kota Tanjungpinang. Batasan studi yang dilakukan adalah mengjaki kontribusi perhotelan dan perkembangan PAD serta variabel yang mempengaruhi peningkatan PAD. Kedalaman studi di dalam Pendapatan Asli Daerah hanya pada pajak perhotelan, pajak perhotelan lainnya (pajak pertambahan nilai perhotelan), karena mempunyai konstribusi paling besar dan mempunyai potensi dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian digunakan dalam studi terdiri dari pendekatan dan tahapan penelitian, pengumpulan data, dan analisis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui survei, dimana survei tersebut yaitu:

➤ Survei Sekunder

Data survei diperoleh dari data-data dan literatur yang ada di instansi terkait serta buku-buku yang ada kaitannya dengan survei sekunder itu sendiri. Data ini umumnya sudah terpola sesuai dengan aturan masing-masing instansi. Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir.

1.5.2 Metode Pendekatan Studi

Untuk mencapai maksud dan tujuan studi diatas maka perlu diadakannya pendekatan studi adalah sebagai berikut

- ❖ Mengidentifikasi variable bebas dan variable terikat perhotelan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang.

- ❖ Mengidentifikasi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Perhotelan di Kota Tanjungpinang
- ❖ Menganalisis peran setiap Kecamatan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang.

1.5.3 Metode Analisis

Metodologi analisis yang akan digunakan adalah metodologi penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan analisis yang dipergunakan di dalam penelitian tugas akhir ini terbagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut

1. Analisis deskriptif peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui perhotelan
2. Analisis Pengaruh dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah melalui perhotelan
3. Analisis deskriptif peran Kecamatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Perhotelan

A. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi penting bagi pengambilan keputusan. Untuk mengetahui potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya bias diukur melalui potensi pajak daerah.

Tabel I.1
Matriks Analisis Yang Akan Digunakan

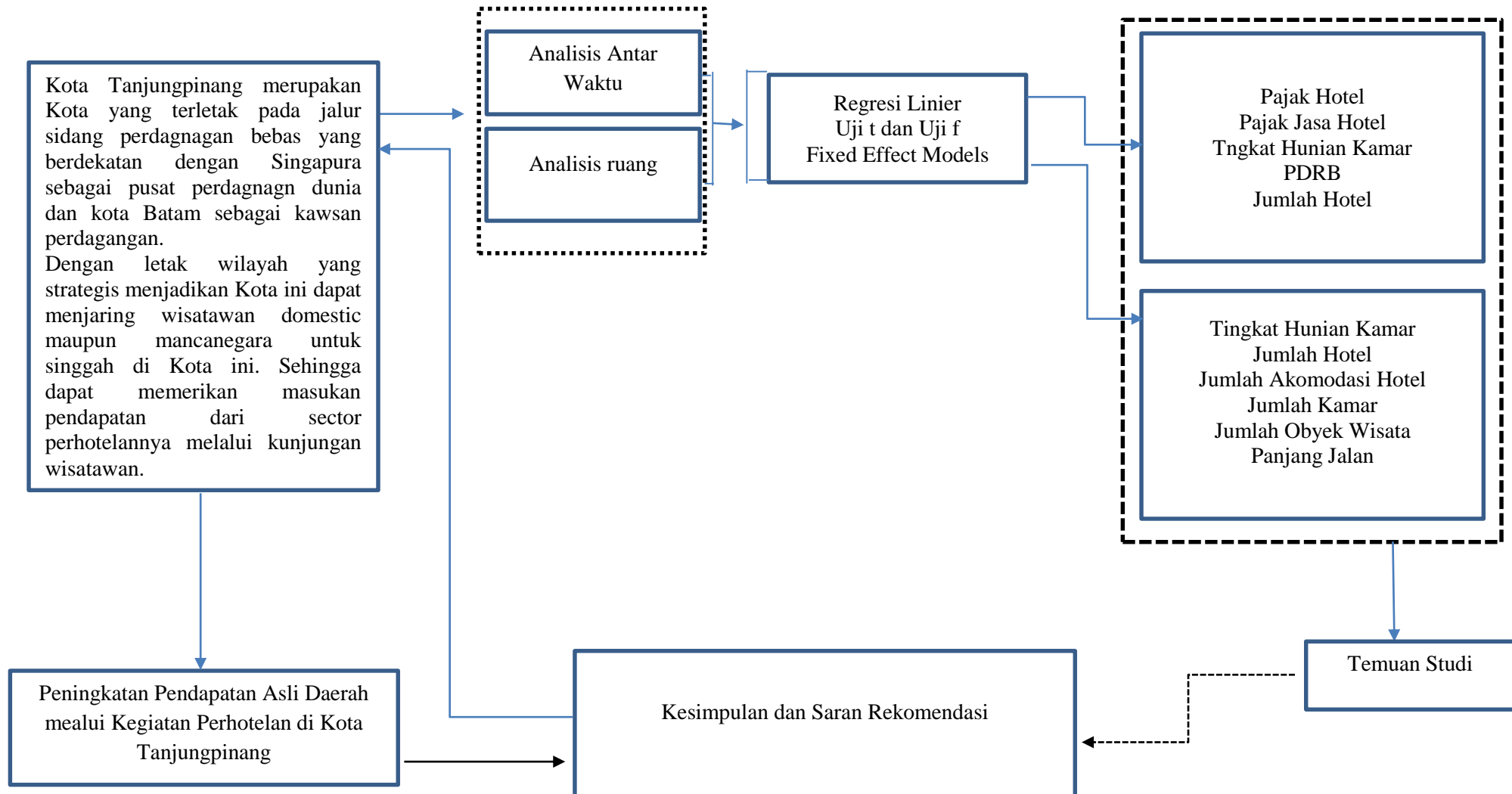
No	Sasaran	Metode Analisis	Formula/Keterangan
1.	Memperoleh variabel yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah dilihat dari kegiatan industri	Metode Kuantitatif	Kriteria <ul style="list-style-type: none"> • Uji Regresi Berganda (Uji-F) • Uji Regresi Parsial (Uji-t) • Uji Heterogenitas • Uji Multicoleris $Y = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$ $PAD = PH + PJH + JH + PDRB + PDD$

No	Sasaran	Metode Analisis	Formula/Keterangan
			$THK = JH + PJJ + AK + OW + JK$ Keterangan : PAD Pendapatan Asli Saerah PH = Pajak hotel PJH = Pajak Jaasa Hotel PDRB = Produk Domestik Regional Bruto PDD = Penduduk THK = Tingkat Hunian Kamar PJJ = Panjang Jalan AK = Akomodasi Hotel OW = Obyek Wisata JK = Jumlah Kamar
2.	Memperoleh kecamatan yang berperan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	Metode Kuantitatif	Kriteria <i>Fixed Effect</i> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Regresi Berganda (Uji-F) • Uji Regresi Parsial (Uji-t) $Y = \alpha_0 + B_1 S_{it} + B_2 Q_{it} + B_3 P_{it}$

Tabel I.2
Matrik Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Jenis Data	Symbol
1	Pendapatan Asli Daerah	Dalam satuan rupiah, dengan jenis data jutaan.	Rasio	Y
2	Pajak Hotel	Dalam satuan rupiah, dengan jenis data jutaan.	Rasio	X1
3	Pajak Jasa Hotel	Dalam satuan rupiah, dengan jenis data jutaan.	Rasio	X2
4	PDRB	Dalam satuan rupiah, dengan jenis data jutaan.	Rasio	X3
5	Jumlah Penduduk	Dengan satuan jiwa	Rasio	X4
6	Tingkat Hunian Kamar	Dengan satuan rupiah per kamar	Rasio	X5
7	Panjang Jalan	Dengan satuan kilometer	Rasio	X6
8	Akomodasi Hotel	Dengan satuan unit.	Rasio	X7
9	Obyek Wisata	Dengan satuan unit.	Rasio	X8
10	Jumlah Kamar	Dengan satuan unit.	Rasio	X9

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan, akan dibahas mengenai latar belakang penelitian dan rumusan permasalahannya, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup wilayah dan studi dari penelitian, dan metodologi penelitian yang dipergunakan beserta tahapan studinya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dibahas mengenai berbagai definisi yang diperlukan di dalam penelitian, potensi dan dampak pengembangan sector pariwisata dan ketetapan-ketetapan serta penjelasan terhadap metodologi penelitian yang akan dipergunakan pada tahap penelitian selanjutnya, yang diperoleh dari berbagai sumber literature seperti buku, jurnal, artikel, dan berita yang bersifat ilmiah.

BAB III SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI KEGIATAN PERHOTELAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Pada gambaran umum, akan dibahas mengenai letak geografis, sumber Pendapatan Asli Daerah pada Perhotelan di Kota Tanjungpinang.

BAB IV ANALISIS PENGARUH DAN PERAN SETIAP KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI KEGIATAN PERHOTELN

Pada analisis, akan dibahas mengenai hasil data dan informasi yang diperoleh, hasil pengolahan data dan informasi ke dalam alat analisis yang digunakan, dan deskripsi hasil analisisnya. Pada bab ini juga akan dapat dilihat keterkaitan antara studi literatur dengan analisis, yang akan disimpulkan pada bab selanjutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab terakhir ini, akan dijelaskan kesimpulan dari hasil temuan studi, dan rekomendasinya. Pada bab ini juga akan dapat diketahui catatan pelaksanaan studi dan saran untuk studi lanjutan.